

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Abidin, Farid zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika
- Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2017 Rineka Cipta, Bandung
- Andi Hamzah, 2007, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembangunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa Dan Nusamedia, Bandung
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng, Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group
- Elizabrth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Faisal Santiago, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cintya Press, Jakarta

- Hans Kelsen, 2011, *General Theory Of Law And State*, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung
- Harahap, Yahya. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta
- Ismail Prabowo, 1998, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharmawangsa Media Press, Surabaya
- J. A, Denny, 2013 *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, ctk. Pertama*, Gramedia, Jakarta
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, London: Oxford University Press, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Enam Pradnya Paramita, Jakarta
- Mappiasse, Syarif. 2020. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, 2004, STIH IBLAM, Depok
- Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, 2008, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset, Surabaya
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Jakarta

- Reksodiputro, Mardjono. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan Syahrini, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru
- Satjipto, Rahardjo.(2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Shant
- Dellyana.1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT. SinarGrafika, Jakarta, 2011.
- Taufiq, Muhammad. 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wessy Trisna, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

JURNAL

- Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.
- Agustin, L. A., & Astuti, P. (2022). Analisis Yuridis Perkara Jaksa Pinangki (Studi Kasus: Putusan No. 10/Pid. Sus-Tpk/2021/PT DKI). *Novum: Jurnal Hukum*, 11-20.
- Almi, N., & Nasution, A. S. (2024). Analisis Yuridis Amar Putusan Hakim Terhadap Terpidana Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI). *Al Qadhi*, 2(1), 82-92.

- Astika Nurul Hidayah, 2018, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50
- Faisal Santiago, 2014, *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*, Jurnal Lex Publica, hlm 57 FPPTHI, Vol 1. No. 1 Jakarta
- Handayani, T. A., & Pramono, A. (2023). Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Korupsi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI). *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1359-1372.
- Permanasari, N. (2021). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI. *Syntax Idea*, 3(9), 2159-2178.
- Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, *Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1*
- Pratama Taher, Adrian. 2021. “Menyoal Putusan Banding Jaksa Pinangki & Tren Vonis Koruptor Rendah.” *Tirto.id*, Juni 16.
- Rahmah, N. (2023). The Problem of the Jakarta High Court Decision Number 10/Pid. Sus-Tpk/2021/pt DKI Against Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH, M. H. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2(1)

INTERNET

Handar Subhandi Bakhtiar , <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis--pelengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc/?page=2> , diakses pada 15 April 2025

Supardi, 2024, *Pembaharuan Hukum Pidana Pertemuan Ke-4 Penal Reform, Penal Policy, Law Enforcement Policy dan Criminal Policy (Presentasi Power Point Slide 15-16)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI